

## TAJUK RENCANA

### Kontroversi Permenaker Soal JHT

**PERATURAN** Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) masih menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kalangan legislatif meminta agar Menaker mencahkan aturan tersebut karena tidak memenuhi asas keadilan masyarakat, namun pemerintah tetap kukuh mempertahankan dan akan memberlakukan peraturan baru tersebut Mei 2022.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah pun mempersilakan bila Permenaker No 2 Tahun 2022 hendak diuji materi ke Mahkamah Agung (MA). Bahkan, Ida mengatakan uji materi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Bila memang demikian, kita masih harus menunggu proses hukum di MA.

Kita sangat memahami munculnya keberatan dari masyarakat terutama pekerja terkait aturan tersebut. Sebab, pada dasarnya JHT adalah dana mereka sendiri, bukan dana dari APBN, sehingga mereka-lah yang mestinya berhak mengaturnya. Karenanya, aturan bahwa JHT baru dapat diambil setelah pekerja mencapai usia 56 tahun dinilai tidak realistis dan merugikan pekerja.

Banyak pertanyaan muncul terkait aturan itu, misalnya bila pekerja di-PHK sebelum usia 56 tahun, mengapa juga tidak bisa mengambil dana JHT yang notabene uangnya sendiri? Padahal saat itu pekerja sangat membutuhkan dana cepat atau segera, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.

Nampaknya Menaker tetap bertahan pada aturan bahwa JHT untuk kepentingan pekerja, bukan pemerintah. Itu merupakan investasi pekerja yang dananya dijamin aman karena diawasi oleh lembaga internal

maupun eksternal, seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pernyataan ini mengingatkan kita pada kasus asuransi Jiwasraya dan Bumiputera yang bermasalah dan belum selesai hingga sekarang. Padahal kedua lembaga asuransi ini diawasi secara internal maupun eksternal, namun ternyata bermasalah sehingga merugikan nasabah.

Tentu kita tak mengharapkan kasus semacam itu terulang. Belajar dari dua kasus tersebut, meski sudah ada pengawasan, baik internal maupun eksternal, ternyata tidak menjamin dana masyarakat aman. Ini tak lain karena pengelola dana masyarakat mengabaikan prinsip kehati-hatian. Akibatnya, masyarakatlah akhirnya yang dirugikan.

Permenaker No 2 Tahun 2022 memang memberi peluang penarikan dana sebelum pekerja berusia 56 tahun, namun sifatnya terbatas, yakni mereka yang memenuhi persyaratan telah memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun. Selain itu, dana yang dapat diambil adalah 30 persen untuk pemilihan rumah atau 10 persen untuk keperluan lainnya dalam persiapan pensiun. Namun pada prinsipnya dana JHT diberikan ketika pekerja mencapai usia 56 tahun.

Hemat kita, kalau pemerintah memandang JHT adalah investasi masyarakat, seharusnya bersifat sukarela. Tidak boleh ada paksaan orang untuk berinvestasi. Karenanya, kita menginginkan agar masyarakat diberi keleluasaan untuk mengatur dananya sendiri, apakah mau ditabungkan atau investasi atau diambil untuk memenuhi kebutuhannya. Barangkali ini jalan tengah yang bisa ditawarkan kepada masyarakat agar mereka tidak dirugikan. □

# Kalender Islam dan Kebersamaan

## Susiknan Azhari

Indonesia 1443-144 H) sendiri? Jika menyelisih Taqvim Standar Indonesia maka perbedaan awal Ramadan 1443 H tidak bisa dihindari.

Melihat realitas di atas kehadiran kalender Islam pemersatu sangat dinantikan. Penyatuan kalender Islam memerlukan cara pandang baru dalam memahami *nash* dan realitas. Keduanya perlu dipadukan untuk membangun peradaban



KR-JOKO SANTOSO

**SETIAP** tahun beredar berbagai macam kalender Islam di Indonesia. Dalam kalender tersebut sudah diketahui awal bulan setiap bulan kamariah, sejak Muharam hingga Zulhijah. Meski begitu, setiap menjelang bulan Ramadan masyarakat bertanya kapan puasa Ramadan dimulai dan diakhiri. Dalam praktiknya ada yang konsisten permulaan bulan sesuai tanggal yang tertera di kalender. Ada pula yang setiap bulan menunggu hasil observasi, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan antara yang tertulis dengan hasil observasi.

Pada tahun 1443 H /2021-2022 M hingga bulan Rajab telah terjadi perbedaan sebanyak 4 kali antara pengguna wujudul hilal, visibilitas hilal, dan *rukyatul hilal* dalam memulai awal bulan kamariah di Indonesia, yaitu Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Rajab. Dalam empat kasus tersebut *wujudul hilal* dan visibilitas hilal MABIMS (2,3,8) bersamaan sebanyak 3 kali (Safar, Rabiul Akhir, dan Rajab 1443 H), sedang *rukyatul hilal* menyelisih keduanya. Satu kali visibilitas hilal MABIMS bergandengan dengan *rukyatul hilal* dan berbeda dengan *wujudul hilal* (Jumadil Awal 1443).

Peristiwa ini kemudian memunculkan pandangan dari salah seorang pemerhati bahwa "Awal Ramadan 1443 H" akan terjadi perbedaan. Jika dicermati secara seksama kalender hijriah yang beredar di Indonesia, baik yang dikeluarkan pengguna *wujudul hilal*, visibilitas hilal MABIMS (2,3,8), dan *rukyatul hilal* ketiganya menetapkan awal Ramadan 1443 H jatuh pada Sabtu Pon 2 April 2022.

Lalu bagaimana posisi *rukyatul hilal* awal Ramadan 1443 H? Berdasarkan pengalaman selama ini ada pihak yang akan melaporkan melihat hilal. Sekiranya tidak ada yang melaporkan keberhasilan melihat hilal, di sinilah Menteri Agama RI diuji. Akankah MENAG RI konsisten dengan kalender yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI (Taqvim Standar

yang berkemajuan. Ibarat keberadaan sebuah bandara yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat maka diperlukan keberadaan bandara baru sesuai perkembangan zaman.

Begitu halnya dalam mewujudkan kalender Islam pemersatu tentu akan mengalami diskusi yang panjang. Namun semua proses harus dilakukan dengan penuh kasih sayang. Bagi pihak yang mungkin belum memahami nilai penting kehadiran kalender Islam yang mapan. Hal ini dimungkinkan cara pandang yang dimiliki. Apalagi terkait "keyakinan" dalam memahami *nash*. Semua itu harus dihormati.

Meskipun demikian proses penyatuan

harus terus berjalan. Kalender Islam Global tentu bisa menjadi pilihan untuk menunjukkan keindahan peradaban Islam. Kendala yang terjadi selama ini karena sosialisasi dan kajian tentang kalender Islam global kurang maksimal dan belum merata baik tingkat nasional, regional, maupun internasional. Begitu juga literatur tentang Kalender Islam Global masih terbatas.

Akibatnya arti penting kehadiran kalender Islam global belum banyak dipahami dan dirasakan. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu diperlukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan baik tingkat nasional, regional, maupun internasional. Kehadiran kalender Islam global selain untuk mewujudkan kebersamaan dalam beribadah juga bisa digunakan untuk sistem akuntansi syariah dan sistem penggajian. Jika hal ini dipahami maka sangat dimungkinkan akan banyak yang tertarik dan menerima kehadirannya.

Tak dapat dipungkiri dalam konteks penyatuan kalender Islam pemerintah telah banyak berkontribusi. Meskipun demikian tidak ada salahnya langkah-langkah yang dilakukan dievaluasi agar lebih terarah dan hasilnya maksimal. Dengan demikian kalender Islam pemersatu yang diimpikan dapat segera diwujudkan. □

*\*) Prof Dr Susiknan Azhari, Guru Besar Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktur Museum Astronomi Islam.*

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotcopy identitas. Terimakasih.

# Inovasi 'DEWI-DEDI', Solusi Ketimpangan Desa

## Alimansyah

**SEJAK** 26 November 2007, secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati bahwa setiap tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia. Hari keadilan sosial sedunia untuk mendukung upaya masyarakat dunia dan mencari solusi agar dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dan juga untuk memenuhi aspirasi masyarakat melalui pemerintahan yang inklusif terutama kemiskinan dan ketimpangan.

Namun seremonial ini harus dimaknai secara substansi, bukan hanya melakukan peringatan Hari Keadilan Sosial secara rutinitas dan selanjutnya selesai tanpa ada pekerjaan rumah yang bisa diselesaikan berdasarkan permasalahan bangsa, tetapi lebih dari itu bagaimana mencari solusi dan melakukan langkah yang nyata untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut, sehingga cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara mewujudkan negara yang adil, makmur dan sejahtera bisa tercapai.

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan oleh *the founding father*, Pancasila menjadi Dasar, Falsafah dan Ideologi negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu sila yang terdapat dalam sila kelima dari Pancasila. Hal ini menjadi landasan dan sekaligus ukuran bahwa keadilan sosial sebagai tujuan dan kemajuan Indonesia.

Sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila diturunkan ke dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai penjabaran cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melindungi seluruh rakyat, mencerdaskan dan mensejahterahkan rakyat Indonesia dimanapun saja berada termasuk di Desa.

Ketimpangan sosial di desa merupakan

permasalahan keadilan sosial yang belum terselesaikan dan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, termasuk di desa. Saat ini, menurut data BPS 2021, kemiskinan di desa masih jauh lebih tinggi dibanding angka kemiskinan di kota. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 yaitu 7,60 persen, sedang persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 12,53 persen. Dengan demikian permasalahan ketimpangan sosial antara kota dan desa masih menjadi permasalahan saat ini.

Selain itu secara spasial pembangunan di desa masih tertinggal dibanding perkotaan, walau saat ini anggaran yang digelontorkan ke desa semakin besar setiap tahunnya. Namun menurut data survei Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa pada tahun 2021 masih ada sekitar 12.635 desa tertinggal dan 5.649 desa Sangat Tertinggal di seluruh Indonesia.

## Dewi Dedi sebagai Solusi

Sebagai negara terindah di dunia pada tahun 2022 berdasarkan *publish* oleh situs *money.co.uk*, Indonesia berada di urutan pertama membawahi negara-negara maju seperti Selandia Baru, Jepang dan Prancis. Keindahan alam terutama gunung berapi, terumbu karang, gletser, garis pantai, maupun hutan, hampir dimiliki oleh setiap wilayah di Indonesia, termasuk desa yang ada di DIY. Karena itu konsep Desa Wisata (DEWI) yang selama ini sudah banyak dilakukan dan berhasil bisa menjadi *best practice* yang dapat dikembangkan lebih masif lagi ke setiap desa yang hampir semua memiliki potensi wisata.

Selain itu, di era digitalisasi saat ini tentu potensi desa yang indah bisa lebih digali dan produk yang ada dapat branding keluar desa sehingga desa bisa menjadi tujuan wisata dan produk-produk yang ada dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas dengan menjadikan desa sebagai Desa Digital (DEDI). Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendatangkan pekerjaan baru serta mengentaskan kemiskinan di desa.

Akhirnya di Hari Keadilan Sosial Sedunia, saatnya untuk merefleksikan pekerjaan rumah, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yaitu menjadi negara adil, makmur dan sejahtera, termasuk di desa dengan menjadikan Desa Wisata dan Desa Digital sebagai salah satu solusi terhadap kesenjangan dan keadilan sosial, termasuk di DIY yang merupakan tujuan wisata dunia. □

*\*) Alimansyah., Dosen Administrasi Publik Universitas Bengkulu, Mahasiswa Doktorat Manajemen & Kebijakan Publik UGM.*

## Pojok KR

DPR minta aturan JHT ditinjau ulang.  
-- Tak cuma ditinjau, tapi diubah.  
\*\*\*  
Pemda DIY siap aktifkan satgas isoman.  
-- Segera saja, kasus terus melonjak.  
\*\*\*  
Tak ada zona merah di Kota Yogya.  
-- Soal hijau atau merah, tergantung masyarakat.

*Berabs*

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

## Isoman atau Masuk Shelter?

**MAKIN** banyak warga DIY yang terpapar Omicron varian baru Covid-19. Banyak ahli Kesehatan menyatakan, jika terkena Omicron sebaiknya segera isolasi saja di rumah karena dianggap lebih ringan ketimbang Covid-19 atau varian barunya Delta. Tetapi DIY me-

nyatakan mulai mengaktifkan shelter untuk isolasi.

Mohon bertanya, sebaiknya jika ada keluarga yang terkena Omicron sebaiknya isolasi mandiri saja di rumah atau masuk shelter yang disediakan. □

*\*) Munawardi, Banguntapan, Bantul.*

## Mengatur Jalur Skuter

**KETIKA** saya wisata ke Yogya, di sejumlah jalan seperti Malioboro, Kaliurang, Jl Marga Utama saya lihat banyak yang menggunakan skuter lalu Lalang di sepanjang jalanan. Maka saya merasa terganggu di tengah jalan kaki santai, tiba-tiba harus menghindar berkali-kali karena ada skuter lewat. Kelihatannya memang menarik, namun rasa-rasanya sebagai

pejalan kaki saya agak ribet karena beberapa kali harus menghindari.

Usul saya, agar pemerintah yang berwenang mulai mengatur jalur skuter. Supaya kami dan wisatawan lain bisa lenggang kangkung lewat, tak harus terganggu. □

*\*) Ny Lita Sunaryo, Kalideres, Jakarta.*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkyk@yahoo.com](mailto:iklankrkyk@yahoo.com), [iklankrkyk13@gmail.com](mailto:iklankrkyk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaran... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.